

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT BPR GEMILANG PERSERODA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Analysis Of Internal Control In Credit Provision At Pt Bpr Gemilang Perseroda Indragiri Hilir Regency

Mansyur¹, Novriani Susanti², Ranti Melasari³

Email: mansurtbh10@gmail.com¹, novrianisusanti95@gmail.com²,
ranti.akuntansiunisi@gmail.com³

^{1,2,3}Univesitas Islam Indragiri

Jl. Soebrantas, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau Kode Pos 29211

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT BPR Gemilang Perseroda Kabupaten Indragiri Hilir. Pengendalian internal merupakan instrumen krusial dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan prosedur pemberian kredit, serta meminimalkan risiko kredit bermasalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan data sekunder berupa dokumen internal bank. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai penerapan unsur-unsur pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPR Gemilang Perseroda telah menerapkan pengendalian internal dengan baik pada aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Namun, pemantauan terhadap kredit masih perlu ditingkatkan agar risiko kredit bermasalah dapat terdeteksi lebih cepat. Penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian internal yang efektif tidak hanya menjaga kualitas kredit dan transparansi operasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah serta mendukung stabilitas kinerja keuangan bank. Temuan ini penting bagi pengelolaan risiko kredit dan perbaikan prosedur internal untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional perbankan.

Kata Kunci: Pengendalian internal, Pemberian Kredit, Bank Perkreditan Rakyat, Risiko Kredit, Efektivitas.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of internal control systems in credit provision at PT BPR Gemilang Perseroda, Indragiri Hilir Regency. Internal control is a crucial instrument for maintaining the effectiveness, efficiency, and compliance of credit procedures, as well as minimizing the risk of non-performing loans. The study employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing primary data through in-depth interviews with relevant personnel and secondary data from the bank's internal documents. The analysis systematically examines the implementation of internal control components, including control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The results indicate that PT BPR Gemilang Perseroda has effectively applied internal control in the areas of control environment, risk assessment, control activities, and information and communication. However, monitoring of credit requires improvement to ensure faster detection of potential credit risks. This study emphasizes that effective internal control not only safeguards credit quality and operational transparency but also enhances customer trust and supports the bank's financial stability. These findings are significant for credit risk management and improving internal procedures to increase operational efficiency and security in banking.

Keywords: Internal Control, Credit Provision, Bank Perkreditan Rakyat, Credit Risk, Effectiveness

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi lokal [8]. Menegaskan bahwa tingkat literasi keuangan pengelola lembaga keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha dan berkelanjutan layanan keuangan di tingkat lokal [19]. Berdasarkan berbagai pemberitaan ekonomi nasional, penyaluran kredit Bank Perekonomian Rakyat dinilai mampu membantu masyarakat dalam memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dibandingkan bank umum, terutama di daerah kabupaten dan pedesaan. Namun demikian, tingginya intensitas penyaluran kredit juga diiringi dengan meningkatnya risiko kredit bermasalah yang dapat berdampak pada stabilitas dan kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang memadai menjadi kebutuhan mutlak bagi Bank Perekonomian Rakyat agar proses pemberian kredit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Dalam praktik pemberian kredit, pengendalian internal berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan transparansi, akurasi data, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Badan pengawas perbankan Indonesia, OJK, juga telah menerbitkan berbagai regulasi yang menekankan pentingnya internal control, termasuk kewajiban penerapan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat tata kelola, mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan, serta memberikan perlindungan terhadap nasabah dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri perbankan. Dengan demikian, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat tidak hanya diperlukan untuk melindungi aset bank, tetapi juga untuk menciptakan iklim transparansi serta kepercayaan publik terhadap layanan perbankan [3].

Pemberian kredit merupakan salah satu sumber risiko terbesar bagi bank, karena berarti bank menempatkan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada debitur yang memiliki risiko ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya. Di Indonesia, OJK terus mengawasi profil risiko kredit bank dan mendorong bank untuk menjaga kualitas asetnya agar risiko kredit tetap terkendali. Kondisi tersebut memberikan tekanan tersendiri bagi lembaga perbankan untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif sejak proses awal pengajuan kredit hingga pemantauan setelah pencairan. Hal ini menjadi sangat relevan bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), karena bank ini memiliki fokus pada segmen masyarakat yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga risiko kreditnya cenderung lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya [17].

Selain itu, peningkatan standar pengendalian internal dalam lembaga perbankan di Indonesia juga sejalan dengan tuntutan global mengenai tata kelola risiko dan praktik perbankan yang berintegritas. Upaya memperkuat fungsi audit internal, yang merupakan bagian integral dari pengendalian internal, didorong oleh regulator melalui berbagai forum dan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas pelaku industri jasa keuangan di tanah air. Penguatan audit internal ini diharapkan dapat mendeteksi kelemahan sistem lebih cepat, memperbaiki prosedur operasional, dan meminimalkan penyimpangan yang dapat berujung pada kerugian bank serta menurunkan kepercayaan masyarakat [16].

Bank Perekonomian Rakyat Gemilang Perseroda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu lembaga perbankan daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam menyalurkan kredit secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Tantangan yang dihadapi dalam proses pemberian kredit antara lain ketidakpastian kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan informasi tentang debitur, serta potensi gagal bayar akibat faktor eksternal. Mengingat BPR beroperasi pada wilayah lokal yang ekonominya belum sekuat perbankan nasional, pengendalian internal menjadi faktor kunci untuk menjamin bahwa setiap tahapan pemberian kredit dijalankan dengan standar prosedur yang ketat dan transparan. Penerapan pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat membantu bank dalam mengelola risiko kredit serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah [15].

Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT Bank Perekonomian Rakyat Gemilang Perseroda Kabupaten Indragiri Hilir. Analisis ini penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengendalian internal yang diterapkan selama ini mampu menjamin prosedur pemberian kredit berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi di masa yang akan datang [1].

Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan pengendalian internal dalam proses

pemberian kredit pada PT Bank Perekonomian Rakyat Gemilang Perseroda Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian diarahkan untuk menelaah bagaimana kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian internal diterapkan pada setiap tahapan pemberian kredit, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, hingga pengawasan pascakredit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dalam proses pemberian kredit serta menilai peran pengendalian internal dalam meminimalkan risiko tersebut. Dengan arah penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh bank, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi perbaikan guna mendukung pengelolaan kredit yang sehat, transparan, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT BPR Gemilang Perseroda Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan lembaga perbankan daerah dengan peran strategis dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Lokasi ini dipilih karena bank telah menerapkan sistem dan prosedur pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian serta didukung kebijakan pengendalian internal di setiap tahapan proses kredit, mulai dari analisis, persetujuan, pencairan, hingga pengawasan pascakredit. Karakteristik pengelolaan kredit di bank ini relevan untuk dianalisis dalam penelitian mengenai pengendalian internal guna meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga kualitas portofolio kredit [21].

Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat langsung dalam proses pemberian dan pengelolaan kredit di PT BPR Gemilang Perseroda, termasuk analis kredit, bagian pemasaran, pejabat pemutus kredit, serta bagian administrasi dan pengawasan. Populasi ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam setiap tahapan proses kredit. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan relevansi informasi. Sampel meliputi pegawai yang paling memahami dan terlibat langsung dalam proses kredit, seperti analis kredit, pejabat pemutus kredit, bagian pemasaran, serta administrasi dan pengawasan kredit. Sampel ini diharapkan memberikan data yang akurat terkait penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit. Jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pemberian dan pengelolaan kredit, untuk memperoleh informasi terkait prosedur kredit, penerapan pengendalian internal, dan mekanisme pengawasan kredit [20]. Pendekatan wawancara mendalam juga memungkinkan peneliti menggali pengetahuan lokal dan pemahaman kontekstual informan yang tidak dapat diperoleh melalui data tertulis semata [9].

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip internal bank, meliputi SOP pemberian kredit, struktur organisasi, dokumen perjanjian kredit, data penyaluran dan pengawasan kredit, serta kebijakan internal terkait pengendalian internal [13]. Data sekunder ini memperkuat hasil analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mendalam mengenai prosedur pemberian kredit dan pengendalian internal, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi [20].

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui studi dokumen dan arsip resmi, seperti SOP, struktur organisasi, dokumen perjanjian kredit, dan laporan pengawasan kredit, untuk mendukung hasil wawancara dan observasi.

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan, pengelompokan, dan penyusunan data secara sistematis untuk diinterpretasikan sesuai teori dan konsep pengendalian internal. Analisis membandingkan data lapangan dengan ketentuan dan konsep pengendalian internal yang berlaku, bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit. Hasil disajikan secara deskriptif agar dapat ditarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian [20].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Dasar Pencatatan Akuntansi dalam Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian administrasi dan keuangan PT BPR Gemilang Perseroda Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa seluruh transaksi keuangan terkait pemberian kredit telah dicatat menggunakan sistem pencatatan *double entry* (pencatatan berpasangan). Setiap transaksi dicatat pada dua sisi secara bersamaan, yaitu sisi debit dan kredit. Sistem ini diterapkan secara konsisten untuk semua jenis transaksi kredit, mulai dari pencairan dana kepada debitur, penerimaan angsuran pokok dan bunga, hingga pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa dasar pengakuan transaksi yang digunakan adalah basis akrual. Pihak bank menjelaskan bahwa pendapatan bunga kredit diakui pada saat bunga tersebut menjadi hak bank, meskipun pembayaran dari debitur belum diterima secara tunai. Hal ini berlaku pula untuk pengakuan beban operasional yang dicatat pada saat kewajiban timbul. Berdasarkan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan internal bank, ditemukan bahwa pencatatan dilakukan secara terkomputerisasi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga setiap transaksi kredit dapat ditelusuri melalui jejak audit yang lengkap.

2. Siklus Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian administrasi kredit, diketahui bahwa siklus akuntansi di PT BPR Gemilang Perseroda dimulai dari pengumpulan dan verifikasi dokumen bukti transaksi. Setiap transaksi kredit wajib didukung oleh dokumen yang sah, antara lain formulir permohonan kredit, perjanjian kredit, bukti pencairan, dan bukti setoran angsuran. Informan menjelaskan bahwa tanpa kelengkapan dokumen tersebut, transaksi tidak dapat diproses lebih lanjut dalam sistem.

Hasil observasi terhadap sistem akuntansi bank menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi perbankan yang terintegrasi. Pencairan kredit dicatat pada akun kredit yang diberikan dan akun kas, sedangkan penerimaan angsuran dicatat melalui pengurangan saldo kredit disertai pengakuan pendapatan bunga. Data transaksi kemudian diringkas ke dalam buku besar dan dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan periodik yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas.

Selain itu, hasil wawancara dengan manajer kredit mengungkapkan bahwa bank menyusun laporan kredit khusus secara bulanan, meliputi laporan posisi kredit, laporan kolektibilitas kredit, dan laporan kredit bermasalah. Laporan-laporan ini disampaikan langsung kepada direksi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait kualitas portofolio kredit.

3. Penerapan Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit

Analisis penerapan pengendalian internal dilakukan berdasarkan lima komponen kerangka COSO. Hasil penelitian secara ringkas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1: Penerapan Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit

No	Unsur Pengendalian Internal	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Lingkungan Pengendalian	Sudah diterapkan	Ada struktur & SOP
2	Penilaian Risiko	Sudah diterapkan	Analisis 5C
3	Kegiatan Pengendalian	Cukup baik	Pemisahan fungsi
4	Informasi & Komunikasi	Sudah diterapkan	Sistem akuntansi
5	Pemantauan	Belum optimal	Monitoring kredit

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

a. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama PT BPR Gemilang Perseroda, bank telah memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan wewenang yang tegas antar unit kerja. Setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan uraian jabatan yang telah ditetapkan. Informan menyatakan:

"Kami memiliki SOP yang mengatur setiap tahapan proses kredit, mulai dari pengajuan hingga pelunasan. SOP ini menjadi acuan wajib bagi seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan OJK."

Studi dokumentasi terhadap dokumen internal bank mengonfirmasi tersedianya SOP pemberian kredit yang lengkap, mencakup prosedur pengajuan kredit, analisis kelayakan, persetujuan berjenjang, pencairan, dan pengawasan pascakredit. Ditemukan pula dokumen kode etik pegawai yang menjadi landasan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

b. Penilaian Risiko

Hasil wawancara dengan analis kredit menunjukkan bahwa setiap pengajuan kredit wajib melalui proses analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter debitur), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal yang dimiliki), *collateral* (agunan), dan *condition* (kondisi ekonomi). Analisis ini dilakukan secara menyeluruh sebelum rekomendasi kredit disampaikan kepada pejabat pemutus kredit. Lebih lanjut, bank juga melakukan survei lapangan langsung ke lokasi usaha calon debitur untuk memverifikasi data yang disampaikan dalam berkas pengajuan. Informan menyatakan:

"Kami tidak hanya mengandalkan dokumen yang diserahkan calon debitur. Tim analis turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi usaha dan kemampuan bayar calon debitur sesuai dengan yang dilaporkan."

Berdasarkan studi dokumentasi, ditemukan bahwa bank memiliki formulir analisis kredit yang terstandarisasi dan harus diisi lengkap oleh analis sebelum berkas diteruskan ke tahap persetujuan.

c. Kegiatan Pengendalian

Hasil wawancara dengan kepala bagian kredit mengungkapkan bahwa bank telah menerapkan pemisahan fungsi antara bagian pemasaran kredit, analis kredit, pejabat pemutus kredit, bagian pencairan, administrasi kredit, serta bagian pengawasan dan penagihan. Tidak ada satu pegawai pun yang dapat mengendalikan seluruh proses kredit secara mandiri. Informan menyatakan:

"Proses kredit kami dirancang agar tidak ada satu orang yang bisa memutuskan sendiri dari awal hingga akhir. Ada checker dan approver di setiap tahap sebagai bentuk kontrol berjenjang."

Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa ketika jumlah pegawai tidak mencukupi, terutama di cabang dengan personel terbatas, terkadang terjadi rangkap tugas antara fungsi analis dan fungsi administrasi kredit. Kondisi ini diakui sebagai celah dalam penerapan pemisahan fungsi yang idealnya harus dijaga secara konsisten.

d. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian teknologi informasi, PT BPR Gemilang Perseroda telah menggunakan sistem informasi perbankan yang terintegrasi untuk mengelola data kredit secara menyeluruh. Sistem ini memungkinkan manajemen memperoleh informasi mengenai posisi kredit, kolektibilitas debitur, dan pendapatan bunga secara *real-time*. Informan menjelaskan:

"Semua data kredit tersimpan dalam sistem kami secara terpusat. Manajemen bisa mengakses laporan posisi kredit kapan saja tanpa harus menunggu laporan manual dari masing-masing unit."

Hasil observasi terhadap sistem informasi bank menunjukkan bahwa setiap perubahan data kredit tercatat secara otomatis disertai identitas pengguna, waktu perubahan, serta data sebelum dan sesudah perubahan dilakukan. Fitur ini berfungsi sebagai jejak audit digital yang memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian data.

e. Pemantauan

Hasil wawancara dengan manajer risiko mengungkapkan bahwa kegiatan pemantauan kredit dilakukan melalui penagihan angsuran secara rutin, evaluasi kolektibilitas kredit setiap bulan, serta penyampaian laporan kredit bermasalah kepada direksi. Namun, informan mengakui adanya kelemahan mendasar dalam sistem pemantauan yang berjalan saat ini. Informan menyatakan:

"Kami sudah melakukan monitoring, tetapi masih bersifat reaktif. Kami baru mengetahui kredit bermasalah setelah tunggakan terjadi beberapa kali, bukan sejak tanda-tanda awal mulai muncul."

Hasil wawancara lebih lanjut mengungkapkan bahwa belum tersedia sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi debitur yang mulai menunjukkan indikasi kesulitan membayar sebelum tunggakan resmi tercatat. Keterbatasan ini diakui sebagai kelemahan utama dalam aspek pemantauan kredit bank saat ini.

Pembahasan

1. Dasar Pencatatan Akuntansi dalam Pemberian Kredit

Penerapan sistem *double entry* dan basis akrual yang ditemukan di PT BPR Gemilang Perseroda sejalan dengan standar akuntansi perbankan yang berlaku. Sistem *double entry* memastikan bahwa setiap transaksi memengaruhi minimal dua akun secara bersamaan, sehingga kesalahan pencatatan lebih mudah terdeteksi dan risiko manipulasi data dapat diminimalkan. Sementara itu, basis akrual menghasilkan laporan keuangan yang lebih mencerminkan kondisi keuangan sesungguhnya karena pendapatan dan beban diakui berdasarkan kejadian ekonomi, bukan arus kas semata. Menegaskan bahwa sistem akuntansi yang dirancang dengan baik, termasuk penerapan *double entry* dan basis akrual, merupakan komponen fundamental dalam mendukung pengendalian internal yang efektif di setiap lembaga keuangan [11]. Kombinasi keduanya menjadi fondasi yang kuat bagi terselenggaranya pengendalian internal yang efektif, karena setiap transaksi kredit dapat dicatat, diawasi, dan dievaluasi secara memadai untuk meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan [20].

2. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi yang berjalan secara tertib dan terdokumentasi di PT BPR Gemilang Perseroda mencerminkan praktik tata kelola keuangan yang baik. Kelengkapan dokumen sebagai syarat mutlak pencatatan transaksi merupakan bentuk pengendalian preventif yang efektif untuk mencegah pencatatan transaksi fiktif atau tidak sah. Penyusunan laporan kredit khusus secara berkala juga menunjukkan bahwa bank tidak sekadar mengelola data akuntansi secara umum, melainkan secara aktif memantau kualitas kredit yang disalurkan. Praktik ini mendukung fungsi pengendalian internal secara menyeluruh karena manajemen memiliki informasi yang cukup untuk mendeteksi potensi masalah kredit sejak dini dan mengambil tindakan korektif secara tepat waktu [13].

3. Penerapan Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit

a. Lingkungan Pengendalian

Keberadaan struktur organisasi yang jelas dan SOP yang terdokumentasi dengan baik mencerminkan lingkungan pengendalian yang kondusif. Lingkungan pengendalian yang kuat merupakan fondasi utama dari seluruh komponen pengendalian internal lainnya, karena tanpa komitmen manajemen dan kejelasan tata kelola, komponen lain tidak dapat berfungsi secara optimal [12]. Penelitian terkait juga menunjukkan bahwa kejelasan struktur dan pembagian tugas berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengendalian manajemen secara keseluruhan [2]. Temuan ini mengindikasikan bahwa PT BPR Gemilang Perseroda telah membangun landasan pengendalian yang solid sebagai prasyarat bagi berjalannya komponen pengendalian lainnya.

b. Penilaian Risiko

Penerapan analisis 5C yang didukung verifikasi lapangan mencerminkan pendekatan penilaian risiko yang komprehensif dan tidak hanya bersifat administratif. Identifikasi risiko sejak tahap awal merupakan langkah krusial dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah, karena keputusan pemberian kredit yang didasarkan pada analisis yang cermat akan menghasilkan portofolio kredit yang lebih sehat. Penilaian risiko kredit yang dilakukan secara sistematis terbukti efektif dalam menekan potensi kredit bermasalah pada lembaga BPR [14]. Verifikasi lapangan yang dilakukan bank juga memperkuat validitas data yang dijadikan dasar keputusan, sehingga risiko informasi asimetris antara bank dan debitur dapat diminimalkan secara lebih efektif.

c. Kegiatan Pengendalian

Pemisahan fungsi yang diterapkan bank merupakan bentuk kegiatan pengendalian yang fundamental dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam proses kredit. Pengendalian intern yang dirancang dengan pemisahan fungsi yang memadai terbukti dapat mengurangi risiko piutang tak tertagih secara signifikan [6].

Namun, temuan adanya rangkap tugas akibat keterbatasan pegawai menjadi perhatian serius karena melemahkan efektivitas pemisahan fungsi yang telah dirancang. Keterbatasan sumber daya manusia memang menjadi kendala umum yang dihadapi BPR dalam menerapkan kegiatan pengendalian secara optimal [10]. Selain aspek struktural, penguatan nilai dan budaya integritas dalam organisasi juga terbukti menjadi faktor penting yang dapat memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya dalam mencegah potensi kecurangan yang muncul akibat kelemahan procedural [7]. Internalisasi nilai-nilai lokal seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge dalam budaya kerja aparatur terbukti berperan dalam pencegahan tindak penyimpangan dan penguatan integritas organisasi [18].

d. Informasi dan Komunikasi

Ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dan mampu menghasilkan data secara *real-time* merupakan komponen penting dalam mendukung pengendalian internal yang efektif. Informasi yang akurat dan tepat waktu memungkinkan manajemen merespons potensi masalah kredit dengan cepat sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Sistem informasi akuntansi yang baik terbukti berperan krusial dalam mendukung efektivitas pengendalian internal di sektor perbankan [5]. Fitur jejak audit digital yang ditemukan pada sistem bank juga menunjukkan bahwa akuntabilitas setiap transaksi terjaga dengan baik, sehingga potensi manipulasi data dapat dideteksi dan dicegah secara lebih efektif. Dalam penelitian pada lembaga keuangan serupa menemukan bahwa system informasi yang terintegrasi dengan jejak audit yang lengkap berkontribusi signifikan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit secara menyeluruh [4]. Menegaskan bahwa kelengkapan dokumentasi digital dan keterlacakan data kredit merupakan indikator penting dari kematangan system pengendalian internal di lembaga BPR [22].

e. Pemantauan

Kelemahan pada aspek pemantauan yang ditemukan di PT BPR Gemilang Perseroda merupakan temuan yang kritis, mengingat pemantauan merupakan komponen terakhir sekaligus penjaga akhir dalam sistem pengendalian internal. Pemantauan yang masih bersifat reaktif tidak cukup untuk menjaga kualitas portofolio kredit secara berkelanjutan. Dalam penelitian pada BPR lain menemukan bahwa kelemahan pada aspek monitoring pascakredit secara konsisten menjadi titik terlemah dalam sistem pengendalian intern pemberian kredit [23]. Lemahnya pengawasan pascakredit terbukti dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah, meskipun prosedur awal pemberian kredit telah berjalan dengan baik [12]. Oleh karena itu, pengembangan sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi sinyal awal penurunan kemampuan bayar debitur menjadi kebutuhan mendesak bagi bank dalam rangka memperkuat fungsi pemantauan secara proaktif dan berbasis data.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pengendalian Internal
PT BPR Gemilang Perseroda telah menerapkan pengendalian internal dalam pemberian kredit dengan baik pada beberapa aspek, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta penggunaan sistem informasi akuntansi mendukung efektivitas pengendalian internal.
2. Kelemahan Pemantauan Kredit
Aspek pemantauan (*monitoring*) kredit masih perlu ditingkatkan. Proses monitoring belum sepenuhnya optimal, sehingga deteksi terhadap potensi kredit bermasalah terkadang terlambat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme evaluasi pascakredit.
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Secara keseluruhan, pengendalian internal membantu bank dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kualitas portofolio kredit, dan mendukung kepatuhan terhadap prosedur serta prinsip kehati-hatian perbankan. Sistem ini juga memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran ke Peneliti selanjutnya dengan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak BPR di Kabupaten Indragiri Hilir atau wilayah lainnya agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed method*) untuk mengukur tingkat efektivitas pengendalian internal secara lebih terukur. Pengembangan variabel penelitian seperti peran teknologi informasi, kompetensi pegawai, dan pengaruh regulasi OJK terhadap pengendalian internal juga disarankan sebagai topik riset lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arianto, D. (2025). *BPR Gemilang dorong pertumbuhan UMKM di Indragiri Hilir*. Riau Post. <https://www.riapos.co/news>
- [2] Asdar, M., Darmawan, D., & Harun, H. (2023). Analisis efektivitas sistem pengendalian manajemen atas gaji karyawan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kab. Sidenreng Rappang. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 337–346.
- [3] Crowe Indonesia. (n.d.). *OJK's regulations on internal control and financial reporting transparency*. <https://www.crowe.com/id/news/ojks>
- [4] Deleng, M. R., Dekrita, Y. A., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit pada Puskopdit Swadaya Utama Maumere. *Strategi: Jurnal Manajemen*, 13(1), 23–32. <https://doi.org/10.52333/strategi.v13i1.70>
- [5] Ema, dkk. (2021). Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 101–112.
- [6] Fatimah, F., Harun, H., & Musdalifah, M. (2023). Analisis sistem pengendalian intern dalam memperkecil resiko piutang tak tertagih pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Mamuju. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi 10*.
- [7] Harun, H., Tenriwaru, T., & Tjan, J. S. (2021). Nilai budaya memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan fraud dalam pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 17(2), 131–140.
- [8] Hutagaol, R., Wahyudi, S., & Safruddin, S. (2025). Peran hukum dalam pengelolaan dana desa berbasis kearifan lokal melalui Bumdes di Desa Rambah. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 103–110. <https://doi.org/10.70437/themis.v2i2.923>
- [9] Irmayani, I., Seelagama, P. K., Sukmayana, F. S., Ragbiah, S., & Dahliana, A. B. (2023). Identifying local knowledge and meaning of rural farming communities in the modernization era. *Indigenous Agriculture*, 1(2), 67–78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/ia/article/view/27369>
- [10] Mrianus, dkk. (2020). Evaluasi sistem pengendalian internal dalam proses pemberian kredit pada BPR. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 67–78.
- [11] Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (Ed. ke-4). Salemba Empat.
- [12] Mutmainah, S., dkk. (2019). Analisis pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 45–56.
- [13] Nazir, M. (2017). *Metode penelitian* (Cet. ke-11). Ghalia Indonesia.
- [14] Ngurawan, Y. I., dkk. (2018). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Organisasi dan Manajemen*, 14(1), 23–34.
- [15] Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk>
- [16] Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Pengawasan dan pengaturan perbankan*. <https://ojk.go.id>
- [17] Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Perbankan*. <https://ojk.go.id/id>
- [18] Rahim, A. (2019). Internalisasi nilai Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Jurnal Al Himayah*, 3(1), 29–52.

- [19] Rahmatullah, R., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2024). Tingkat literasi keuangan pengelola Bumdes dalam pengembangan usaha pada Bumdes Desa Rosoan Kabupaten Enrekang. *Journal AK-99*, 4(2), 514–527.
- [20] Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [21] Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- [22] Wijoyo, H. (2020). Analisis pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 157–162. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/449>
- [23] Yudianto, A. (2021). Analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Candi Agung Amuntai. *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 3(2), 31–41. <https://doi.org/10.36658/ijan.3.2.86>